

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Tiongkok merupakan sebuah negara dengan pertumbuhan perekonomian yang sangat massif di dunia saat ini. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah terlihat sejak reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping diakhir tahun 1970an. Reformasi ekonomi tersebut berhasil menjadikan Tiongkok sebagai negara sasaran destinasi investasi terbesar di dunia dan menjadikan Tiongkok sebagai negara industri manufaktur terbesar di dunia, hal tersebut secara tidak langsung berdampak bagi pertumbuhan GDP dan industri di Tiongkok yang berkembang secara pesat pada tahun 2011 (China in the WTO: Past, Present and Future). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah mengalahkan AS, semenjak Tiongkok bergabung kedalam *world trade organization* (WTO) perekonomian Tiongkok terus mengalami peningkatan. Pada waktu yang sama, Tiongkok ingin lebih mengembangkan kiprahnya di dunia internasional, sebagaimana telah disampaikan oleh Xi Jinping dalam selogan pemerintahannya, *China Dream*. *China Dream* telah menjadi tema utama disebagian besar pidato Xi Jinping. Sikap yang dipromosikan Xi Jinping tersebut telah merubah arah kebijakan luar negeri Tiongkok setelah sebelumnya Deng Xiaoping mempromosikan kebijakan *Tao Guang Yang Hui* (tetaplah bersikap rendah hati, mencapai sesuatu). Dimana Xi Jinping memperkenalkan prinsip baru Tiongkok di kancah global yang disebut *Fen Fa You Wei* (terus menjaga kerendahan hati, secara aktif mencari untuk mencapai sesuatu) (Sørensen, 2015).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Xi Jinping mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam proyek ambisius Tiongkok yang disebut *Belt and Road Initiative* (BRI). Xi berharap proyek tersebut akan menjadi jalur perdagangan terbesar di dunia yang akan menghubungkan Asia dan Eropa dan akan meningkatkan dua kali lipat pertumbuhan ekonomi negaranya dalam ulang tahun Tiongkok yang ke 100 tahun. Melalui forum-forum internasional Xi Jinping telah mempromosikan proyek ambisius tersebut kepada negara-negara lainnya, seperti pada 7 September 2013 Xi Jinping memperkenalkan proyek BRI dalam pidatonya di Universitas Nazarbayev Kazakhstan (President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries, 2013). Pidato Xi di Kazakhstan tersebut merupakan langkah awal untuk membuka pintu pertama dari rute proyek BRI menuju Eropa melalui Asia Tengah. Kemudian dilanjutkan Xi dalam pidatonya pada Oktober 2013 di Indonesia untuk membuka jalur maritim proyek BRI (Xinhua, 2015). Pada tahun-tahun berikutnya Xi terus aktif mempromosikan proyek ambisius tersebut, untuk menunjukkan keseriusan Xi dalam implementasi proyek BRI diseluruh dunia.

Kepemimpinan Xi Jinping tengah mengejar pertumbuhan ekonomi dalam upaya memperkuat legitimasi kepemimpinannya. Bersamaan dengan hal tersebut Tiongkok memerlukan sarana pendukung lainnya untuk mencapai target tersebut yaitu dengan memperluas pengaruhnya didunia internasional, dengan memperkuat integrasi ekonomi, aktif dalam dialog global, memperkuat sistem pertahanan, dan ikut serta dalam agenda-agenda internasional. Bersamaan dengan proyek ambisius Tiongkok tersebut, perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespon beberapa isu-isu global menjadi pertanda keaktifan Tiongkok dalam melindungi

rute proyek BRI di beberapa kawasan dunia. Aktivitas ini telah menandakan peningkatan keterlibatan Tiongkok dalam beberapa konflik besar di dunia. Seperti laporan *Mercator Institute for China Studies (MERICS)* bahwa di negara-negara *Middle East and North Africa (MENA)*, keterlibatan Tiongkok dalam upaya penyelesaian di negara-negara tersebut meningkat (Legarda, 2018). Negara-negara tersebut merupakan rute proyek BRI. Keterlibatan Tiongkok di negara-negara tersebut juga ditandai setelah proyek BRI diluncurkan, hal tersebut menjadi indikator kepentingan Tiongkok untuk melindungi proyek BRI tersebut.

Untuk mengetahui keterlibatan Tiongkok dalam dunia internasional lebih dalam lagi, dapat dilihat dari keterlibatan negara tersebut di suatu kawasan tertentu seperti halnya keterlibatan Tiongkok di kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah keterlibatan Tiongkok di dalam konflik Suriah. Konflik Suriah merupakan efek domino dari fenomena *Arab Spring*, sebuah peristiwa jatuhnya rezim-rezim otoriter Arab, dan menjadi titik awal munculnya proses demokrasi di negara-negara Arab (Hadi, Setiawati, & Cipto, 2015). Gelombang demonstrasi yang terjadi di Tunisia telah mempengaruhi masyarakat Suriah untuk melakukan demonstrasi yang sama dalam rangka menuntut perubahan politik yang telah berjalan secara otokrasi (Hasan, 2019). Konflik Suriah tersebut telah mendatangkan pihak-pihak dengan berbagai macam kepentingan, dimana hal tersebut membuat situasi konflik menjadi semakin parah, diantaranya telah merubah demonstrasi damai menjadi konflik bersenjata. Amerika Serikat dan Rusia merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam penyediaan kebutuhan senjata dalam konflik Suriah. Menurut laporan *The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)*, diperkirakan sejak konflik dimulai korban tewas telah mencapai 511.000 jiwa. Konflik yang bermula

dari aksi demonstrasi kepentingan lokal berubah menjadi kepentingan regional dan juga internasional. Pada akhirnya konflik menjadi semakin membingungkan dengan banyaknya kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya yang membuat keadaan menjadi semakin paran dan menjadikannya sebagai konflik multilateral yang kompleks. Kondisi tersebut melatarbelakangi sebagai awal upaya Tiongkok untuk menjadi aktor mediator di dalam konflik Suriah, hal ini dapat dipahami bahwa Tiongkok telah memiliki kedekatan sejarah dengan Suriah yang berlangsung sejak lama. Suriah adalah salah satu negara yang mendukung rancangan resolusi untuk mengembalikan kursi Tiongkok di Dewan Keamanan PBB Dalam Majelis Umum ke-26 dan merupakan bagian dari Jalur Sutera Tiongkok kuno (Zreik, 2019).

Pada Januari 2014 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan lima posisi Tiongkok di konflik Suriah dalam pembukaan Geneva 2 yaitu; resolusi politik; tidak ada intervensi dari luar; inklusivitas dalam proses transisi dan rekonsiliasi nasional; persatuan; dan komitmen dalam memberikan bantuan kemanusiaan (Labate, 2014). Ketidakstabilan kawasan Timur Tengah yang diakibatkan oleh konflik Suriah menjadi latar belakang keterlibatan Tiongkok di dalam konflik tersebut. Oleh karena itu menarik untuk menganalisa lebih dalam bagaimana peran Tiongkok di konflik Suriah. Tujuan riset ini untuk mengetahui peran Tiongkok dalam konflik suriah dengan menggunakan teori *quasi mediation*. Teori *quasi mediation* merupakan salah satu dari sedikit teori baru, yang disusun secara khusus untuk menganalisa bagaimana peranan Tiongkok di Timur Tengah. Teori ini berguna untuk menjelaskan peran Tiongkok di konflik Suriah khususnya mengidentifikasi pola keterlibatan Tiongkok dalam konflik tersebut. Hal ini juga

penting untuk mengetahui peran Tiongkok di kawasan Timur Tengah dan dunia global secara umum.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Mengapa Tiongkok menggunakan *quasi mediation* dalam konflik Suriah pada tahun 2011-2019?

I.3 TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan konflik Suriah di Timur Tengah
2. Untuk mengidentifikasi pola keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah
3. Untuk mengetahui alasan mengapa Tiongkok menggunakan *quasi mediation* dalam konflik Suriah

I.4 SIGNIFIKANSI

Pembahasan mengenai konflik Suriah merupakan isu kontemporer dalam studi Hubungan Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa dampak dari konflik tersebut telah menewaskan hampir 600.000 jiwa dan melibatkan berbagai aktor internasional. Sehingga peneliti menganggap penting untuk melihat bagaimana peran Tiongkok, sebagai salah satu aktor internasional yang cukup diperhitungkan dalam konflik tersebut. Kemudian penting melihat bagaimana kebijakan dan diplomasi Tiongkok terhadap Suriah dengan tidak ikut campur (menjadi *leader*) ketika Suriah membuat kebijakan, melainkan lebih condong untuk menjaga

hubungan karena kepentingan ekonomi dan keamanan. Sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana sikap Tiongkok di Suriah. Namun sebagian penelitian kurang menyoroiti secara detail pola kebijakan Tiongkok di Suriah. Maka dari itu peneliti mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai kebijakan Tiongkok di Suriah, yaitu dengan menggunakan teori *quasi mediation* yang dapat menganalisa lebih dalam bentuk keterlibatan Tiongkok di Suriah dan alasan mengapa Tiongkok menggunakan pola tersebut.

I.5 LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini studi kasus yang akan dibahas oleh penulis antara lain adalah kebijakan Tiongkok di konflik Suriah pada tahun 2011-2019. Alasan memilih periode ini antara lain adalah karena keaktifan peran Tiongkok Tiongkok dalam konflik Suriah sudah bermula sejak konflik tersebut mencuat pada tahun 2011 dan peran tersebut semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya.

I.6 KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai konflik Suriah dibahas dalam tulisan *The Diplomatic Dimensions of the Syrian Conflict*. Tulisan tersebut melihat bagaimana konflik di Suriah melalui dimensi diplomatik, dan melihat adanya kepentingan dari negara-negara besar dunia seperti Russia dan AS. Konflik Suriah telah membagi kelompok-kelompok tersebut menjadi tiga bagian yaitu, kelompok non Barat yang terdiri dari Tiongkok, Russia, dan Iran yang memberi dukungan terhadap rezim, selanjutnya adalah kelompok Barat yang terdiri dari AS, Perancis, Inggris, dan negara barat lainnya yang memberi dukungan terhadap pihak oposisi, serta

kelompok yang netral yaitu Israel dan Palestina. Dinamika diplomasi Russia dan AS dalam konflik kepentingan di Suriah, dipercaya telah merusak diplomasi sebagai cara penyelesaian perang dengan cara damai, seperti yang dilakukan Dewan Keamanan PBB tentang keputusan konsensual untuk menyelesaikan konflik Suriah. Akibatnya upaya yang dilakukan gagal mencapai jalan diplomatik, dan membuat pro rezim dan oposisi menerima bantuan militer dari pihak luar yang menjadi penciptaan perang sipil di Suriah (Olenrewaju & Joshua, 2015).

Kemudian kajian mengenai konflik Suriah juga dapat ditemukan dalam artikel yang berjudul *An Overview of the Conflict in Syria*, yang secara garis besar melihat bahwa konflik Suriah tidak akan selesai dengan lengsernya rezim Bashar Al-Assad. Karena itu tidak akan menyelesaikan semua permasalahan di Suriah, dan justru akan membawa Suriah pada eskalasi militer yang akan menyebabkan perang yang lebih serius dan membawa bencana besar terhadap negara-negara tetangga, seperti Yordania, Irak, Turki, dan negara-negara Teluk. Hal tersebut karena, saat ini konflik Suriah telah menyebabkan multilateral konflik yang secara bersamaan menimbulkan kelompok-kelompok kepentingan baru yang ingin menguasai Suriah. Artikel tersebut melihat bahwa akibat konflik Suriah kelompok pro rezim akan melakukan aksi balas dendam kepada pihak oposisi. Kekhawatiran pihak oposisi adalah bagaimana mereka dapat bertahan hidup, hanya ada dua pilihan yaitu dengan menunggu mundurnya Bashar Al-Assad atau membunuhnya. Karena tidak memungkinkan bagi pihak oposisi dapat hidup normal kembali seperti sebelumnya, atas aksi yang mereka lakukan melawan rezim Bashar Al-Assad. Penulis mengakhiri argumen dengan mengatakan bahwa konflik Suriah telah menjadi

konflik yang permanen, karena tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk keluar dari konflik (Albasoos, 2017).

Secara keseluruhan tulisan diatas membahas mengenai konflik Suriah, khususnya melihat bagaimana faktor eksternal sebagai salah satu penyebab pecahnya konflik Suriah. Namun belum banyak membahas secara khusus bagaimana peranan Tiongkok dalam konflik Suriah. Padahal, Tiongkok memiliki posisi yang cukup penting dan unik dalam konflik Suriah karena Tiongkok merupakan aktor yang aktif dalam melakukan diplomasi langsung terhadap kedua belah pihak yang bertikai, tanpa memihak atau melakukan intervensi di konflik Suriah. Untuk itu penelitian ini berusaha mengisi kekosongan dengan menganalisa secara dalam peran Tiongkok di konflik Suriah.

Tulisan *Russia's Resurgence in Syria: A New Cold War?*, membahas tentang peran *major power* di konflik Suriah. Russia dan AS dalam konflik Suriah merupakan aktor utama. Bantuan militer yang diberikan kepada pihak pemerintah dan pihak oposisi dalam konflik Suriah telah membawa kedua aktor tersebut ikut campur secara langsung dan mengakibatkan intervensi langsung oleh aktor-aktor internasional lainnya. Russia adalah kekuatan besar di Timur Tengah karena satu-satunya negara besar yang memiliki pangkalan militer di Timur Tengah. Baik AS dan Russia saat ini sedang melakukan perang dingin di Timur Tengah untuk dapat mempertahankan kekuatan dan pengaruhnya melalui aliansi-aliansinya. Penyelesaian konflik dengan perang di Suriah diartikan sebagai kegagalan Liga Arab dan PBB dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai (Sadek, 2016).

Artikel yang berjudul *Competing Interests of Major Powers in the Middle East: The Case Study of Syria and Its Implications for Regional Stability* membahas

mengenai kompetisi kekuatan-kekuatan besar di Timur Tengah dengan melihat studi kasus di Suriah. Melihat bahwa lokasi Timur Tengah yang strategis serta kekayaan energi yang dimiliki telah menarik perhatian pihak luar sejak dahulu, untuk ikut serta dalam penyelesaian permasalahan di Timur Tengah. Salman berargumen bahwa keterlibatan pihak luar seperti AS, Russia, dan Tiongkok telah memperparah konflik Suriah. AS lebih condong untuk menyebarkan ideologi demokrasinya dan berusaha menumbangkan rezim Bashar Al-Assad, Tiongkok memiliki pengaruh yang masih terus berkembang di Suriah, sedangkan Russia memiliki minat untuk mempertahankan pangkalan militernya di negara tersebut. Aktor internasional terlihat lebih condong mengarah pada memanfaatkan persaingan regional untuk meraih kepentingan-kepentingan di Timur Tengah (Zulfqar, 2018).

Tulisan diatas memperlihatkan bagaimana peranan negara-negara *major power* dalam konflik Suriah. Aktor dominan dalam konflik Suriah yang telah ditelaah adalah AS, melihat bagaimana serangkaian kebijakan dan intervensi militer yang dilakukan AS. Aktor internasional lain adalah Rusia yang memiliki posisi penting di Suriah, dengan pangkalan militer satu-satunya di Timur Tengah berada di Suriah. Meskipun peran Rusia dan AS di konflik Suriah sudah dibahas dalam tulisan tersebut, namun masih sedikit tulisan yang menganalisa peran Tiongkok di konflik Suriah. Sama halnya dengan artikel berjudul *China's Foreign Policy in the Middle East* yang menyebutkan bahwa peran Tiongkok di Timur Tengah telah menjadi kekuatan ekonomi global utama dalam sektor ekonomi mengalahkan AS. Dijelaskan pula bahwa Tiongkok juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, membuat ketergantungan Tiongkok terhadap energi dan sumber daya

minyak tidak dapat dihindari. Dalam mempertahankan posisi ekonominya Tiongkok terlibat langsung dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki pasokan energi dan minyak terbesar di dunia. Meskipun demikian Tiongkok tidak ingin membangun kerjasama multilateral dengan kawasan Timur Tengah. Melainkan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara di Timur Tengah. Ambisi terbesar Tiongkok di Timur Tengah adalah ekonomi, dengan menjanjikan pembangunan secara menyeluruh tanpa adanya gejolak sosial atau tindakan intervensi. Berbeda dengan AS yang melakukan pembangunan internasional dengan cara mendikte negara-negara tersebut (Umbreen & Waheed, 2016). Namun tulisan ini belum membahas peran Tiongkok dalam konflik Suriah secara mendalam dan faktor yang mempengaruhi peran tersebut.

Artikel yang berjudul *The Political Economy of the Sino-Middle Eastern Relations* juga melihat bagaimana hubungan ekonomi Tiongkok dengan Timur Tengah. Namun ia beranggapan bahwa hubungan tersebut hanya sebatas menjaga keamanan kebutuhan energi dan penjualan senjata. Tiongkok tidak bertujuan untuk merusak kepentingan AS di wilayah tersebut. Kerjasama antara Tiongkok dan Timur Tengah didasari oleh kepentingan bersama, sekaligus membawa keuntungan bagi Timur Tengah, dimana Tiongkok menjadi konsumen stabil hasil energi dan minyak Timur Tengah. Sejak berkurangnya peran AS di Timur Tengah, Tiongkok menjadi aktor yang mengambil peranan penting terhadap negara-negara di Timur Tengah (Olimat, 2010). Namun penelitian ini belum membahas secara mendalam peran Tiongkok dalam konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada literatur-literatur berkaitan dengan

kebijakan Tiongkok di Timur Tengah dengan melihat keterlibatannya di salah satu konflik paling besar di kawasan.

Berdasarkan tiga kelompok penelitian diatas yaitu terkait konflik Suriah, peran negara-negara *major power* di konflik Suriah, dan terkait peran Tiongkok di Timur Tengah, dapat dilihat bahwa belum banyak yang membahas secara detail tentang bagaimana peranan Tiongkok di konflik Suriah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran Tiongkok di konflik Suriah melalui perspektif *quasi mediation*. Hal ini penting karena tidak hanya dapat memberikan gambaran peran Tiongkok dalam konflik Suriah kedepannya namun juga peran Tiongkok di Timur Tengah secara umum.

I.7 KERANGKA KONSEP

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan teori *quasi mediation*. Teori *quasi mediation* merupakan teori yang disusun oleh Deng Sun, yang merupakan seorang pakar peran Tiongkok di Timur Tengah, dan Yahia Zoubir, yang merupakan ahli di bidang geopolitik. Diplomasi *quasi mediation* mengacu pada peran suatu negara dalam aktivitas internasional untuk mempertahankan kepentingan komersial, politik dan diplomatiknya. Dalam menerapkan konsep mediasi *quasi mediation* yang digagas oleh Sun dan Zoubir, keduanya melihat bahwa selama ini standar dalam penerapan konsep mediasi hanya dilakukan oleh negara-negara maju. Sehingga Sun dan Zoubir berusaha membuktikan adanya proses mediasi unik yang juga dilakukan oleh negara berkembang seperti Tiongkok dengan menggunakan konsep mediasi *quasi mediation* (Sun & Zoubir, 2018).

Untuk mempermudah memahami perbedaan antara diplomasi mediasi umum dan *quasi mediation* maka penulis perlu menjelaskan perbedaan yang dimiliki keduanya. *Pertama*; diplomasi *quasi mediation* bertujuan untuk membela kepentingan komersial, politik, dan diplomatik mediator berbeda dengan mediasi umum dalam upaya mencapai kepentingan keamanan dan strategis. *Kedua*; aktor mediator dalam mediasi umum memberikan sikap lebih aktif dalam keterlibatannya di penyelesaian konflik, dimana aktor mediator cenderung terlibat dalam semua upaya penyelesaian konflik. Berbeda dengan mediasi *quasi mediation*, aktor mediator lebih selektif dalam keterlibatannya di penyelesaian konflik, hal ini mengacu pada kemampuan aktor mediator untuk meminimalisir kegagalan dalam penyelesaian konflik. *Ketiga*; dalam mediasi *quasi mediation* aktor mediator lebih memilih untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik daripada mendominasi. *Keempat*; dalam mediasi *quasi mediation* peran aktor mediator adalah mengikuti jalannya proses penyelesaian konflik, berbeda dengan mediasi umum yang berupaya untuk memimpin penyelesaian konflik. *Kelima*; dalam proses penyelesaian konflik, mediasi *quasi mediation* cenderung untuk ikut serta dalam merevisi hasil kesepakatan dan mengemukakan ide-ide konstruktif. Berbeda dengan mediasi umum dalam proses penyelesaian konflik, mediasi ini berusaha untuk mempengaruhi hasil kesepakatan. *Keenam*; komitmen aktor mediator dalam mediasi *quasi mediation* lebih sedikit dibandingkan dengan mediasi umum. *Ketujuh*; mediasi *quasi mediation* mendorong pengurangan dampak konflik sebagai lawan dari resolusi konflik oleh mediasi umum.

**Tabel 1.1 Perbedaan Diplomasi *Quasi Mediation* dan Diplomasi
Mediasi Umum**

	Mediasi Umum	<i>Quasi-Mediation</i>
Keterlibatan kepentingan mediator	Kepentingan Keamanan dan kepentingan strategis	Kepentingan komersial, politik dan diplomatik
Sikap mediator	Pro-aktif	Selektif berdasarkan kasus-perkasus
Posisi mediator	Mediator berperan 'mendominasi'	Mediator memiliki posisi untuk 'berpartisipasi' dalam mediasi
Peran mediator	Mediator berperan dengan 'memimpin' proses mediasi	Mediator berperan dengan 'mengikuti' proses mediasi
Proses mediasi	Mediator berperan mempengaruhi hasil kesepakatan	Mediator berperan merevisi hasil kesepakatan
Komitmen mediator untuk mengerahkan sumber daya	Mediator mengerahkan sumber daya utamanya	Mediator mengerahkan sumber daya rendah dan memiliki komitmen yang rendah
Tujuan Mediator	Mencapai resolusi konflik	Tujuan de-eskalasi konflik

Diplomasi *quasi mediation* memiliki empat level kategori diplomasi yaitu:

- *Multifaceted Intervention*

Multifaceted intervention adalah intervensi beragam segi yaitu mengacu pada bagaimana Tiongkok menggunakan sumber daya

diplomatik. Disini, proses intervensinya mengacu pada agenda negosiasi dengan cara mengirim utusan khusus untuk menangani perselisihan secara langsung. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempengaruhi hasil negosiasi kedua belah pihak. Biasanya dalam melakukan proses negosiasi di level ini, Tiongkok tetap mempertahankan hubungan terhadap semua pihak, baik pihak yang bertikai maupun komunitas internasional yang melakukan upaya yang sama. Proses mediasi di level ini melibatkan para pembuat kebijakan terkemuka termasuk Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri dari negara yang bertikai. Proses negosiasi pada level ini bertujuan untuk menghindari perang. Kemungkinan yang akan dicapai pada level ini adalah mencegah krisis yang terjadi meningkat dan memperburuk keadaan.

Dalam manajemen konflik, Tiongkok sering mendekati pihak-pihak yang bertikai dengan dorongan dan bantuan. Upaya dalam level ini menggunakan istilah mirip dengan taktik 'wortel dan tongkat', dimana Tiongkok memberikan kepada kedua pihak bantuan ekonomi yang diperlukan, kebijakan perdagangan yang condong menguntungkan mereka, pengurangan tarif impor komoditas, mengundang para pemimpin semua pihak untuk mengunjungi Tiongkok, dan memberikan bantuan militer untuk membantu mencapai kesepakatan antara pihak yang bertikai. Di sisi lain bila perlu, Tiongkok memberikan pengaruh melalui bantuan dengan pemotongan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan agar pihak-pihak yang bertikai meningkatkan suhu konflik dan meredam konflik dengan cara yang damai. Apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai maka Tiongkok tidak akan melakukan tindakan yang proaktif.

- *Proactive Involvement*

Proactive involvement adalah upaya Tiongkok menggunakan cara proaktif diplomatik. Yaitu upaya ini dilakukan langsung oleh pemimpin Tiongkok yang menjadi perantara sengketa. Berbeda dengan level sebelumnya yang dilakukan dengan cara intervensi multi-aspek, cara ini langsung dilakukan oleh masing-masing kepala negara yang bersangkutan. Dalam proses negosiasi tersebut, Tiongkok tidak menggunakan cara yang mengintervensi secara langsung melainkan menggunakan berbagai macam cara seperti; pertama, menjadi pemimpin negosiasi atau pembuat keputusan; kedua, tidak menetapkan agenda; ketiga, memberi bantuan ekonomi; dan keempat, tidak memberikan tekanan politik untuk mempengaruhi hasil diskusi. Dalam level ini Tiongkok berupaya mendukung resolusi konflik dan mempercepat proses resolusi konflik dengan harapan hasil jangka pendek, agar konflik dapat segera diselesaikan. Tiongkok berusaha menjaga kebijakan berimbang dari proses tersebut.

- *Limited Intercession*

Limited intercession merupakan penengah terbatas yang merujuk pada jenis mediasi pada level rendah dimana upaya diplomatik yang dilakukan Tiongkok berupa diplomatik tidak penting (diplomasi basa-basi). Karena dalam diplomasi level ini Tiongkok berpartisipasi secara ringan dan melakukannya semata-mata untuk menandai kehadirannya ditengah-tengah konflik tersebut. Biasanya diplomasi ini dilakukan ketika isu-isu tersebut merupakan kepentingan sekunder dari Tiongkok. Sehingga dampak dari peran diplomasi itu tidak signifikan dan pihak yang bertikai tidak menerima

pengaruh yang berarti dari Tiongkok, dan solusi damai jangka pendek yang dihasilkan dari diplomasi tersebut rendah. Tiongkok dalam menyelesaikan kasus dengan mengirim utusan diplomasi sementara satu persatu sesuai kasus.

- *Indirect Participation*

Indirect participation adalah partisipasi tidak langsung yaitu Tiongkok tidak mengambil tindakan secara proaktif, tetapi berpartisipasi secara tidak langsung dalam manajemen konflik yang diinisiasi oleh organisasi internasional. Seperti penyelesaian sengketa atau konflik melalui PBB. Biasanya Tiongkok melakukan diplomasi level ini karena memiliki sedikit kepercayaan satu sama lain antar pihak yang bertikai. Tiongkok tidak berbuat banyak untuk mempengaruhi kedua pihak. Baik pihak yang bertikai maupun organisasi internasional.

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisa level keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah dari empat level diatas. Namun tidak hanya itu, peneliti juga akan menelaah faktor pendorong yang menyebabkan Tiongkok berada pada level tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam menjelaskan empat level keterlibatan di atas, teori ini juga memberikan penjelasan terkait faktor pendorong Tiongkok menggunakan *quasi mediation*. Faktor pendorong tersebut dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. Relevan Dengan Kepentingan Komersial

Keterlibatan Tiongkok di dalam kawasan konflik dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki oleh Tiongkok. Di dalam argumen ini semakin besar kepentingan komersial Tiongkok di suatu kawasan, maka potensi Tiongkok untuk terlibat di dalam konflik tersebut juga semakin besar. Di dalam artikel yang ditulis oleh Sun dan Zoubir menyinggung keterlibatan Tiongkok di suatu kawasan disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pertama, pengamanan jalur perdagangan energi dan memastikan stabilitas harga kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kedua, menjaga stabilitas keamanan kawasan untuk memastikan tidak adanya ketidakstabilan kawasan yang disebabkan oleh monopoli sumber daya alam di kawasan oleh aktor lain atau kekuasaan kelompok militan bersenjata. Ketiga, untuk melakukan serangkaian langkah diplomatik guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan yang berpotensi mengancam keamanan investasi Tiongkok. Kepentingan komersial merupakan kepentingan terpenting Tiongkok melihat perkembangan pesat ekonomi dan tuntutan modernisasi Tiongkok.

2. Jangkauan Pengaruh Tiongkok

Di dalam poin ini menjelaskan bagaimana hubungan Tiongkok dengan pihak-pihak yang berkonflik. Semakin besar kemungkinan Tiongkok memberikan pengaruhnya dalam sebuah konflik maka semakin besar kemungkinan Tiongkok akan terlibat. Langkah diplomasi mediasi yang dilakukan pada umumnya memerlukan keinginan dan sumberdaya yang besar dalam mendorong pengaruhnya kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Seperti yang dilakukan oleh Presiden AS ke-39 Jimmy Carter

terhadap proses damai antara Israel dan Mesir, dimana AS memberikan komitmen untuk memberikan bantuan ekonomi dan keamanan kepada keduanya. Namun hal tersebut diragukan akan dilakukan oleh Tiongkok, mengingat Tiongkok enggan memberikan dana cuma-cuma kepada pihak yang berkonflik. Bahkan dalam beberapa pernyataan Tiongkok mengatakan bahwa mereka mengakui tidak mampu untuk memberikan sumber dayanya secara signifikan di dalam konflik MENA. Maka dari hal tersebut peran Tiongkok dalam suatu konflik akan mempertimbangkan potensi kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan kedua pihak yang berseteru dengan tujuan untuk meminimalisir pengeluaran sumberdaya bantuan yang dibutuhkan.

3. Konsensus Kekuatan Besar Dunia

Di bagian penjelasan faktor ini disebutkan bahwa keterlibatan Tiongkok di dalam suatu konflik akan melihat keterlibatan aktor-aktor negara yang memiliki kekuatan besar di dalam konflik tersebut. Yaitu semakin besar aktor-aktor kekuatan besar yang terlibat di dalam konflik tersebut maka keterlibatan Tiongkok menggunakan diplomasi *quasi mediation* juga akan semakin besar. Keputusan Tiongkok untuk tidak secara aktif bermain peran di konflik tersebut tidak hanya disebabkan karena tidak adanya kepentingan ekonomi Tiongkok di dalam konflik tersebut. Melainkan juga karena ketidakmampuan aktor-aktor tersebut dalam menyelesaikan konflik tersebut. Karena dampak yang akan ditimbulkan ketika Tiongkok memainkan peran aktif di dalam konflik yang telah gagal diselesaikan akan berdampak memperburuk citra Tiongkok di masyarakat internasional.

Tiongkok mendapat desakan dari masyarakat internasional untuk berkontribusi di dalam proses perdamaian dunia karena Tiongkok merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut merupakan faktor yang mendorong Tiongkok untuk berperan di dalam suatu konflik. Yaitu untuk menyebarkan pengaruhnya sebagai salah satu negara anggota tetap PBB. Sehingga upaya yang dilakukan Tiongkok dalam suatu konflik adalah menunjukkan keperdulianya di dalam isu kemanusiaan meskipun kepentingan ekonomi di dalam permasalahan tersebut hanya sedikit. Seperti pada konflik Israel-Palestina, upaya yang dilakukan Tiongkok dalam konflik tersebut untuk memastikan bahwa Tiongkok ikut terlibat dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

4. Tingkat Kesulitan Dalam Penyelesaian Konflik

Pada faktor terakhir yang menjadi pendorong Tiongkok untuk terlibat di dalam suatu konflik adalah tingkat kesulitan di dalam konflik tersebut. Apabila suatu konflik semakin mudah diselesaikan maka keterlibatan Tiongkok dalam konflik tersebut juga akan semakin besar. Pada tahap ini melihat peran Tiongkok dalam suatu konflik akan mempertimbangkan keputusan para pemangku kebijakan terhadap taraf kesulitan suatu konflik. Dapat dikatakan bahwa upaya diplomatik yang akan dilakukan Tiongkok untuk mengirimkan utusan khususnya dipengaruhi oleh tingkat kesulitan penyelesaian konflik tersebut. Semakin mudah tercapainya resolusi dari konflik tersebut maka akan semakin besar kemungkinan Tiongkok terlibat dalam konflik tersebut.

Tiongkok memiliki perbedaan mediasi bila dibandingkan dengan aktor negara-negara *major power* seperti Rusia dan AS di konflik Suriah dalam melakukan mediasi. Dimana Rusia dan AS lebih condong menggunakan peranan mediasi umum, sementara Tiongkok menggunakan *quasi mediation*. Tiongkok melakukan *quasi mediation* dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan dari kebijakannya tanpa terlibat terlalu jauh. Kepentingan yang terdapat dalam *quasi mediation* lebih menitik beratkan kepada aktor ketiga dibandingkan dua aktor yang berselisih. Bagaimana Tiongkok dapat merekonsiliasi kebijakan *quasi mediation* diplomatiknya dengan prinsip non-intervensi yang telah lama ada. Untuk menganalisis konflik di Suriah penelitian ini akan menggunakan pendekatan yaitu *multifaceted intervention*, khususnya melihat bagaimana Tiongkok mengeluarkan kebijakan diplomasinya untuk berpartisipasi menyelesaikan konflik di Suriah. Tidak hanya itu, peneliti juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong apa saja yang mendorong Tiongkok berperan secara *multifaceted* di dalam konflik tersebut.

I.8 METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Karena sifat data dari penelitian ini adalah ilmu sosial politik yang mendasarkan pengetahuannya pada dinamika interaksi sosial. Dimana interaksi sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihitung sehingga penggunaan metode kualitatif dapat memenuhi kriteria dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Penulis akan menggunakan data-data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari hasil laporan langsung terhadap lembaga pemerintah atau instansi terkait dari

laporan dan kebijakan Tiongkok di konflik Suriah atau instansi lainnya. Kemudian data sekunder yaitu data yang didapat dari jurnal-jurnal, berita, dan badan-badan peneliti terhadap studi kasus yang akan dikupas dalam menjawab rumusan masalah.

I.9 PROSES PENELITIAN

Proses penelitian adalah suatu tahapan yang menyangkut perencanaan atau langkah dalam melakukan riset, dimulai dari pra riset sampai laporan penelitian. Proses ini dianggap sangat penting karena sebagai acuan penulisan dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis harus mengikuti seluruh rangkaian proses agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Adapun prosedur yang digunakan dalam riset ini adalah:

1. Pra Riset

Pra Riset merupakan kegiatan yang dilakukan untuk persiapan riset. Yaitu melihat hasil laporan terkait penelitian, dan membaca bacaan sesuai penelitian.

2. Pengambilan Data

Dalam pengambilan data dalam riset ini, maka akan menggunakan data-data sekunder sebagai data pendukung riset ini. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang berasal dari media tertulis, mencakup: majalah berkala, buku teks akademis, pernyataan resmi dari kebijakan Tiongkok, dan surat kabar harian. Sumber-sumber tersebut dipilih karena memiliki reputasi dan kredibilitas media / penerbit dan hubungannya dengan topik dari riset.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data yang telah di dapat perlu untuk dibaca secara rinci dan menyeluruh. Proses ini memungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data.

Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan bacaan dengan cepat. Tujuan dari proses ini adalah untuk memilih materi terkait dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait.

c. Pengkodean

Proses pengkodean melibatkan upaya pelabelan data tertentu yang dilakukan dalam riset. Kisaran kode dapat dikembangkan selama proses analisis.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Fase ini melibatkan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk menemukan korelasi antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Tahap terakhir dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu menafsirkan makna dari data. Interpretasi adalah tindakan menjelaskan sesuatu, dalam hal ini adalah catatan terkait dokumen dan bahan bacaan.

